

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TORAJA UTARA 2013



ABSTRACT-BACKGROUNDS.COM



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TORAJA UTARA

<http://torutkab.bps.go.id>

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TORAJA UTARA 2013**

No. Publikasi : 73265.0904

Ukuran Buku : 23 cm x 17 cm

Jumlah Halaman : 28 Halaman

Naskah : BPS Kabupaten Toraja Utara

Penyunting : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



PENGANTAR

Kebutuhan konsumen akan data statistik semakin kompleks, khususnya data sosial. Untuk memenuhi data tersebut Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara menerbitkan publikasi *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara 2013*.

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan rakyat dan indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Toraja Utara.

Data yang digunakan untuk menganalisis dua hal tersebut di atas adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013, disamping data sekunder yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi IPM selanjutnya.

Rantepao, September 2014

*Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Toraja Utara*

*Ruben, SE
Nip. 19631223 199202 1 001*

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Sumber Data	3
BAB II. METODE PENGHITUNGAN	4
2.1. Cara Penghitungan IPM	4
2.2. Ukuran Perkembangan IPM	6
BAB III. GAMBARAN UMUM	9
3.1. Letak Geografis	9
3.2. Kependudukan	9
3.3. Pendidikan	10
3.4. Ketenagakerjaan	11
3.5. Kesehatan	13
3.6. Konsumsi/Pengeluaran	14

BAB IV. ANALISIS IPM	16
4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara	17
4.2. Aspek Kesehatan	19
4.3. Aspek Pendidikan	21
4.4. Aspek Ekonomi	24
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1.. Kesimpulan	25
5.2. Saran	25

<http://torutkab.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Pada tahun 60-an banyak negara melaporkan bahwa di satu sisi berhasil mencapai pendapatan perkapita tinggi, namun di sisi lain penduduk miskin makin bertambah jumlahnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi akan sulit mencapai masyarakat yang makmur, aman dan terbebas dari tekanan hidup yang merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pada hakekatnya keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur dari berhasilnya membangun gedung-gedung pencakar langit serta jalan-jalan yang mulus akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat yang ke tempat yang tinggi. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya. Model-model alternatif pembangunan yang ditawarkan adalah pembangunan sumber daya manusia, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan manusia, akan tetapi ketiga model pembangunan ini dinilai masih bersifat parsial belum bersifat holistik.

Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya yaitu, tanah, modal dan mesin. Manusia diperalat untuk mengejar tingkat output yang tinggi namun dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada kebutuhan dasar manusia agar dapat keluar dari kemelut kemiskinan. Model ini telah mengiring manusia terpasung hingga tidak memiliki pilihan-pilihan lain. Sedangkan pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif atau dengan perkataan lain manusia tidak mengambil bagian untuk berperan dalam pembangunan.

Dengan demikian, pada tahun 1990 UNDP dalam laporannya “*Global Human Development Report*” memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (*Human Development*)”, sebagai paradigma baru model pembangunan. Konsep ini lebih komprehensif dan bersifat holistik yang mencakup ketiga model sebelumnya.

Berbagai pergeseran dalam kebijaksanaan pembangunan menyebabkan pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada harus disesuaikan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “*basic need development*”. Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf.

Kemudian dengan muncul dan berkembangnya paradigma baru pembangunan manusia, sejak tahun 1990 UNDP menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara sebagai penyedia data memandang perlu menghitung Indeks Pembangunan Manusia agar dapat digunakan berbagai perangkat untuk melakukan pengkajian guna mengukur kinerja pembangunan manusia selama ini dalam kurun waktu tertentu dimana “*strong point*”nya pada pembangunan manusia dengan menggunakan parameter IPM atau HDI.

1.2 Tujuan Penulisan.

Tujuan penulisan publikasi Mutu Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 adalah:

- a. Mengetahui komponen IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Standar hidup layak konsumsi perkapita Kabupaten Toraja Utara.
- b. Mengetahui Pencapaian Pembangunan Manusia.

1.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah data Susenas 2013 dan beberapa data sekunder lainnya dapat dijadikan referensi untuk menganalisis buku publikasi ini.

METODE PENGHITUNGAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas penduduk, hal ini dapat ditempuh dengan cara meningkatkan kapasitas dasar daya beli. Peningkatan kapasitas dasar adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas penduduk melalui pengembangan pengetahuan dan pendidikan serta perbaikan derajat kesehatan penduduk. Upaya ini merupakan bagian dari fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas social ekonomi dasar. Sedangkan peningkatan daya beli dapat ditempuh melalui perbaikan ekonomi, sehingga tercipta perluasan kesempatan kerja.

Dalam upaya peningkatan efektifitas pembangunan manusia, tidak terlepas dari penggunaan data statistik baik untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Perencanaan pembangunan dengan didukung oleh data statistik yang baik akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data Susenas Kor dapat dibentuk berbagai indikator kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan.

2.1 Cara Penghitungan IPM

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kondisi Ideal (sasaran) dan Kondisi Terburuk Komponen IPM

Faktor (1)	Indikator Komponen IPM [=X(i)] (2)	Kondisi	
		Ideal (3)	Terburuk (4)
Kelangsungan Hidup (Lamanya Hidup)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25
Pengetahuan (Tingkat Pendidikan)	Angka Melek Huruf	100	0
	Rata-rata lama sekolah	15	0
Daya Beli (Tingkat Kehidupan yang Layak)	Konsumsi riil per kapita (Rp)	732.720	360.000

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP

2.2 Ukuran Perkembangan IPM

Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Meningkatnya status pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan nilai IPM suatu daerah. Nilai IPM ini mencerminkan kualitas penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kenaikan/penurunan nilai IPM secara tidak langsung merupakan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk disuatu daerah.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah kedalam tiga golongan yang rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50 s/d 80), dan tinggi (80 keatas). Untuk keperluan daerah tingkat II (level kabupaten), tingkat status menengah dibagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tingkatan Status Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 50$
Menengah Bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah Atas	$66 \leq IPM < 80$
Tinggi	$IPM > 80$

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP

Klasifikasi status pembangunan manusia dapat digunakan untuk menunjukkan apakah upaya pembangunan yang telah dilakukan dapat meningkatkan “kelas” suatu wilayah. Jika “kelas” wilayahnya meningkat berarti terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk.

2. Membuat peringkat berdasarkan besaran IPM yang dapat menunjukkan secara relatif kinerja pembangunan suatu wilayah terhadap wilayah lain. Dengan diketahuinya peringkat IPM, maka tingkat kesejahteraan disuatu daerah dapat dibandingkan dengan daerah lain. Besaran IPM merupakan besaran kumulatif selama beberapa tahun dan periode terakhir, maka peringkat yang dihasilkan juga merupakan hasil kinerja kumulatif beberapa masa pemerintahan.

Tabel 2.3 Diagram Analisis Situasi Pencapaian Pembangunan Manusia

Determinan (Indikator)	Kelangsungan Hidup (Angka Kematian Bayi)	Pengetahuan (Lama Sekolah)	Daya Beli (Konsumsi Perkapita)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sebab Langsung	Persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis rendah	Persentase partisipasi sekolah 13-18 tahun rendah	Tingkat upah/pendapatan rendah
Sebab tidak langsung	Pemeriksaan status gizi ibu hamil	Fasilitas Pendidikan	Kesempatan kerja
Sebab mendasar	Kemiskinan, pendidikan	Kemiskinan, Pendidikan	Pertumbuhan ekonomi

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP

GAMBARAN UMUM

3.1 Letak Geografis

Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao memiliki luas wilayah sekitar 1.151,47 km². Daerah ini terdiri dari 21 kecamatan dengan 151 desa/kelurahan.

Jarak ibukota Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan ± 329 km dengan melewati Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Kabupaten Toraja Utara terletak dengan posisi antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju sebelah utara, Kabupaten Tana Toraja sebelah selatan serta pada sebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat.

3.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 berjumlah sebanyak 222.400 jiwa yang terdiri atas 112.000 laki-laki dan 110.400 perempuan dengan sex ratio 101 yang berarti jika terdapat sekitar 101 orang laki-laki diantara terdapat 100 orang perempuan.

Kepadatan penduduk perkilometer persegi sekitar 193 jiwa. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Rantepao yang merupakan ibukota Kabupaten Toraja Utara.

Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2013 sebanyak 83.868 jiwa, penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 124.141 jiwa dan penduduk yang berusia lanjut (65 tahun lebih) berjumlah 14.391 jiwa. Dilihat dari kelompok usia seperti itu, dapat diketahui rasio ketergantungan secara total yaitu 79,15 persen artinya setiap 100 orang yang produktif mempunyai tanggungan sebanyak 79 hingga 80 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

3.3 Pendidikan

Potensi sumber daya manusia di suatu daerah antara lain dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari semakin rendahnya persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah dan semakin tingginya persentase penduduk yang memiliki ijazah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2012, persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah sebesar 28,82 persen turun menjadi 28,00 persen pada tahun 2013. Demikian halnya persentase penduduk yang memiliki ijazah SLTP, SMA, Diploma I/II, Akademi/DIII, dan D IV/S1 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,29; 4,65; 0,25; 0,53; dan 0,27 persen dari tahun 2012. Hanya persentase penduduk yang memiliki ijazah SD/MI dan SMK pada tahun 2013 yang mengalami penurunan sekitar 5,11 persen untuk kepemilikan ijazah SD/MI yaitu dari 26,61 persen tahun 2012 turun menjadi 21,50 pada tahun 2013 dan untuk SMK menurun sekitar 1,04 persen yaitu dari angka 6,29 persen pada tahun 2012 turun menjadi sekitar 5,25 persen pada tahun 2013. Hal ini

menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan semakin tinggi.

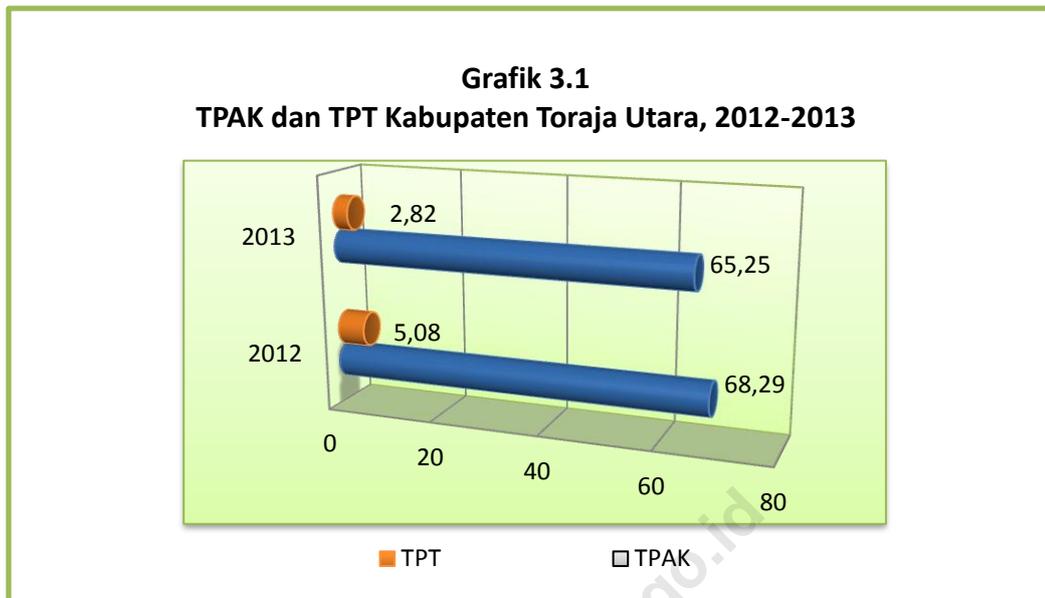
Tabel 3.1
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Di Kabupaten Toraja Utara, 2012 - 2013

Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Tidak Punya Ijazah	28,82	28,00
SD/MI/Paket A	26,61	21,50
SLTP/MTs/Paket B	20,67	20,96
SMA/MA/Pket C	12,80	17,45
SMK	6,29	5,25
Diploma I/II	0,00	0,25
Akademi/ DIII	0,91	1,44
D IV/S1 +	4,88	5,15
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS Toraja Utara, 2013

3.4 Ketenagakerjaan

Konsep utama usia ketenagakerjaan yang dipakai adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara penduduk yang mencarari kerja dengan angkatan kerja.



TPAK di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,04 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 68,29 persen pada tahun 2012 menjadi 65,25 persen pada tahun 2013. Indikasi ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Toraja Utara, sebanyak 65 orang diantara masuk dalam angkatan kerja. Menurunnya TPAK merupakan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu, disisi lain TPT di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 juga mengalami penurunan sebesar 2,26 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari angka 5,08 persen pada tahun 2012, menjadi 2,82 persen pada tahun 2013. Walaupun mengalami penurunan, namun angka pengangguran ini tetap harus menjadi permasalahan yang serius, mengingat pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi, tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Selain itu, masih banyak pula pencari kerja terakomodir oleh lapangan kerja tersedia.

3.5 Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat jasmani dan rohani merupakan modal dasar pembangunan, karena bila SDM sehat maka akan menghasilkan masyarakat yang sehat pula, dimana masyarakat ini akan menjadi pelaku dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan derajat kesehatan penduduk. Pemerintah melalui berbagai program dibidang kesehatan berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu, bayi dan balita. Hal ini berhubungan erat dengan kehamilan ibu, proses kelahiran dan kelangsungan hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan penduduk disuatu daerah adalah persentase penolong kelahiran balita. Keberhasilan penolong kelahiran dan kemampuan seorang ibu untuk melahirkan anaknya sangat penting guna kelangsungan kehidupan anak tersebut selanjutnya. Oleh sebab itu, suatu keluarga perlu membuat keputusan yang paling tepat untuk memilih penolong kelahiran anaknya. Telah banyak fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memudahkan penduduk miskin agar mampu berobat ke rumah sakit ataupun puskesmas melalui program askeskin dan jamkesmas.

Dilihat dari masalah penolong persalinan untuk tenaga medis seperti dokter atau bidan dapat dianggap lebih baik dari pada dukun atau lainnya. Persalinan yang dicakup dalam Susenas ini adalah persalinan yang terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Jadi pada saat terjadinya wawancara anak responden, usia masih balita antara 0 – 4 tahun.

Dengan memperhatikan persentase tersebut di atas berarti pertolongan persalian untuk tenaga medis cukup dominan. Tenaga medis tersebut terutama adalah bidan dan dokter. Dari hasil Susenas 2013 diketahui bahwa penolong

persalinan untuk bidan dan dokter masing-masing jumlahnya mencapai sekitar 67,65 persen dan 10,53 persen.

Tabel 3.2
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran
Kabupaten Toraja Utara, 2012-2013

Penolong Persalinan	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Dokter	7,19	10,53
Bidan	69,94	67,65
Tenaga Medis Lainnya	0,00	0,19
Dukun	18,27	21,11
Keluarga	4,60	0,51
Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Toraja Utara, 2013

3.6 Konsumsi/Pengeluaran

Pendapatan rumah tangga merupakan bagian dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diterima oleh rumah tangga. Pendapatan perkapita atas dasar pendekatan pengeluaran dari hasil Susenas digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan rumah tangga. Dengan diketahuinya perubahan pengeluaran perkapita sebulan untuk setiap tahunnya, maka dapat diketahui pula apakah ada kenaikan/penurunan pendapatan penduduk. Pendapatan yang diterima rumah tangga setiap bulannya berpengaruh pada kemampuan daya beli terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga tersebut.

Sumber : Badan Pusat Statistik Toraja Utara, 2013

Tabel 3.3
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran
Makanan dan Non Makanan, 2012-2013

Kelompok Pengeluaran (Rp 000)	Makanan		Non Makanan	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< Rp 99.	8,49	6,55	54,19	54,70
Rp 100 –149.+	18,53	21,81	17,36	16,15
Rp 150 – 199 +	24,34	20,39	9,86	9,17
Rp 200 -299 +	27,15	25,96	8,35	7,79
Rp 300. +	17,15	25,29	5,74	12,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2013 pengeluaran perkapita penduduk pada kelompok makanan < Rp 99 ribu berkurang menjadi 6,55 persen dari tahun sebelumnya 8,49 persen artinya ada sekitar 1,94 persen yang pengeluarannya tidak lagi berada pada kelompok tersebut. Pada kelompok pengeluaran Rp 300 ribu keatas terjadi peningkatan dari 17,15 persen menjadi 25,29 persen.

ANALISIS I P M

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*), dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara adil, buah pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada kehidupan rakyat sehari-hari, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Proses ini biasanya tidak secara otomatis tampak, akan tetapi memerlukan waktu serta manajemen kebijakan yang hati-hati. Pembangunan oleh rakyat berarti rakyat harus benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal manusia dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan ataupun indikator-indikator lain. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia, akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal ini kinerja ekonominya.

Dengan kata lain, bahwa peningkatan kualitas modal manusia akan sekaligus memberikan mamfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah.

4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia disuatu daerah/wilayah. Jarak yang harus ditempuh (shortfall) suatu wilayah mempunyai nilai maksimum 100. Artinya jika suatu wilayah telah mencapai angka 100 maka pembangunan manusia secara keseluruhan telah tercapai. Jadi suatu wilayah yang mempunyai angka IPM yang masih rendah atau masih jauh dari pembangunan manusia dapat dikatakan masih jauh. Dan tentunya hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua daerah/wilayah/negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penggerak utama harus mengupayakan pemberdayaan manusia sehingga dapat memperpendek jarak tujuan.

Tabel 4.1
IPM Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Terdekat
Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat Propinsi		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Toraja Utara	70,14	71,04	71,69	20	19	19
02. Tana Toraja	72,29	72,90	73,76	10	10	10
03. Luwu Timur	73,11	73,56	73,96	8	8	9
04. Luwu	74,42	74,68	74,68	6	6	6
05. Enrekang	74,84	75,30	75,67	4	4	4
06. Pinrang	73,80	74,39	74,87	7	7	7
Sulawesi Selatan	72,14	72,70	73,28			

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara

Selama periode tiga tahun terakhir, IPM Toraja Utara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai IPM Kabupaten Toraja Utara telah mencapai 71,69 sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 dengan angka IPM baru sekitar 71,04. Sementara ranking IPM Toraja Utara se Sulawesi Selatan masih tetap posisi 19.

Tabel 4.2
Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Toraja Utara, 2011 – 2013

No.	Komponen	2011	2012	2013
1	2	3	4	
1	Kesehatan			
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,58	73,62	73,66
	b. Indeks Kesehatan (%)	80,97	81,03	81,10
2	Pendidikan			
	a. Angka Melek Huruf (%)	85,28	85,85	87,38
	b. Rata-rata Lama Sekolah (%)	7,41	7,86	7,88
	c. Indeks Pendidikan (%)	73,31	74,70	75,76
3	Hidup Layak			
	a. Paritas Daya Beli (Rp 000)	602,89	608,39	611,88
	b. Indeks Daya Beli (%)	56,13	57,40	58,21
	IPM	70,14	71,04	71,69

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51-79 digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi. Dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, maka IPM Kabupaten Toraja Utara tergolong **IPM menengah**. Untuk Sulawesi Selatan belum satupun kabupaten berada pada posisi golongan IPM Tinggi.

Peningkatan angka IPM ini tentunya sangat ditentukan oleh komponen IPM itu sendiri, ada tiga komponen pembentukan IPM yaitu komponen *harapan hidup*, komponen *pendidikan* dan komponen *daya beli*. Terjadinya kenaikan pada setiap komponen berpengaruh pula pada kenaikan angka IPM.

4.2 Aspek Kesehatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, Kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Agar dapat dicapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh makanan, air minum, pakaian, pemukiman, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Disamping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk.

Pada hakekatnya derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan

peran serta masyarakat dan swasta.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

Komponen IPM berupa Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. Pada periode tahun 2011-2013 Angka Harapan Hidup terus mengalami peningkatan, misalnya pada tahun 2011 AHH sebesar 73,58 tahun meningkat menjadi 73,62 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 73,66 tahun. Dibandingkan Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan tahun 2013 hanya sekitar 70,60 tahun yang berarti lebih rendah dari AHH Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Toraja Utara secara rata-rata masih lebih baik dibandingkan tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan secara rata-rata.

Peningkatan AHH ini tidak terlepas dari berbagai aspek pendukung kehidupan masyarakat, seperti sarana kesehatan yang tersedia, peningkatan pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat, fasilitas lingkungan yang tersedia untuk kebutuhan sehari-hari serta kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat disamping telah tersedianya Rumah Sakit Umum sebanyak 2 buah berada di ibu kota Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2013 terdapat 22 buah Puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan. Dengan demikian pada tahun 2012 rasio penduduk per puskesmas adalah sekitar 10.109 orang, artinya bahwa setiap puskesmas dapat melayani 10.109 orang

Pada tahun 2013 tenaga dokter sebanyak 30 orang, perawat 171 orang, bidan 110 orang, farmasi 20 orang, ahli gizi 24 orang, sanitasi 21 orang dan tenaga kesehatan masyarakat 17 orang. tenaga medis dokter (dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi) pada tahun 2012 berjumlah 40 orang, Dengan demikian pada tahun 2012 dari 5.508 orang penduduk terdapat seorang dokter.

4.3 Aspek Pendidikan

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Sulawesi Selatan sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Selatan yang menyebutkan strategi yang dilakukan di antaranya; perluasan dan pemerataan di dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, program wajib belajar 9 tahun, beasiswa dan lain-lain

Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi dan sosial. Sehingga keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat.



Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi mutu sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Indikator untuk melihat perkembangan tingkat pendidikan disuatu daerah diantaranya adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dilihat dari Angka Melek Huruf Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 sebesar 87,38 persen, dengan demikian Angka Buta Huruf di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 masih sekitar 12,62 persen dari total usia 5 tahun ke atas, angka tersebut masih cukup tinggi. Indikasi ini menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Toraja Utara perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, rendahnya AMH penduduk diindikasikan oleh tingginya angka Buta Huruf.

Indikator angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk memonitor tingkat pencapaian pendidikan penduduk dalam bersekolah. Interpretasinya, semakin tinggi angka tersebut maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai/ditamatkan penduduk. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 sebesar 7,88 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Toraja Utara hanya bersekolah sampai kelas dua pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP). Tentunya ini harus menjadi perhatian serius dari berbagai pihak terkait karena angka ini masih sangat rendah.

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap maju atau mundurnya dunia pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah keterbatasan dari sisi jumlah guru pada daerah-daerah terpencil. Isu yang masih sering muncul bahwa banyaknya guru yang enggan ditempatkan pada daerah terpencil, sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah-daerah perkotaan.

Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru dengan murid dan sekolah. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan, namun semakin kecil rasio guru dan murid/sekolah maka akan menggambarkan beban dan ketersediaan guru.

Pada tahun 2013 rasio murid SD terhadap guru SD adalah 23. artinya ada sekitar 23 murid SD yang harus diajar oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar, sementara rasio siswa terhadap guru SLTP/ sederajat sekitar 20, SLTA/ sederajat sekitar 12 dan SMK sekitar 9. Angka rasio tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin kecil angka tersebut artinya pengawasan/beban kerja seorang guru terhadap murid/siswa sekolah akan lebih baik

4.3. Aspek Ekonomi

Dalam bidang ekonomi telah memperlihatkan adanya kecenderungan yang semakin membaik, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto perkapita, paritas daya beli dan dampak terhadap adanya perbaikan ekonomi. Dampak tersebut dapat dicerminkan oleh beberapa informasi pendukung seperti ketersediaan air bersih, listrik dan konsumsi rumah tangga. Dalam bahasan berikut tidak lagi dikemukakan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita, karena hal tersebut telah dikemukakan pada bagian tulisan lain.

Pengukuran pembangunan manusia dikaitkan dengan beberapa aspek, diantaranya adalah aspek daya beli masyarakat. Indeks daya beli masyarakat dicerminkan oleh pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Pengeluaran riil perkapita selama periode 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 pengeluaran riil per kapita sebesar Rp 602.890 meningkat menjadi Rp Rp 608.390 pada tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp 611.880. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat adalah tingkat pendapatan penduduk. Jika pengeluaran perkapita penduduk naik, berarti dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan penduduk juga naik.

Pengeluaran riil perkapita dari tahun ke tahun terus meningkat sangat dimungkinkan oleh karena laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 tumbuh sebesar 8,51 persen, lebih cepat dari tahun sebelumnya 8,47 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. IPM merupakan salah satu tolok ukur yang mencerminkan aspek-aspek pembangunan manusia, dianggap cukup baik untuk menggambarkan aspek sosial maupun ekonomi dalam capaian pembangunan.
2. IPM Kabupaten toraja utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tahun 2013 sudah mencapai angka 71,69, peringkat se Provinsi Sulawesi Selatan pada urutan 19.
3. Komponen IPM Tahun 2013 masing-masing untuk Indeks Kesehatan sebesar 81,10, Indek Pendidikan sebesar 75,76 dan Indeks Daya Beli sebesar 58,21 persen.

5.2. Saran

Karena seluruh komponen IPM masih cukup rendah, maka disarankan kepada semua pihak terkait agar lebih fokus pada bagaimana meningkatkan pembangunan Mutu Sumber Daya Manusia dan sebaiknya dilakukan secara terpadu.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TORAJA UTARA 2013



ABSTRACT-BACKGROUNDS.COM



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TORAJA UTARA

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TORAJA UTARA 2013**

No. Publikasi : 73265.0904

Ukuran Buku : 23 cm x 17 cm

Jumlah Halaman : 28 Halaman

Naskah : BPS Kabupaten Toraja Utara

Penyunting : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



PENGANTAR

Kebutuhan konsumen akan data statistik semakin kompleks, khususnya data sosial. Untuk memenuhi data tersebut Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara menerbitkan publikasi *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara 2013*.

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan rakyat dan indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Toraja Utara.

Data yang digunakan untuk menganalisis dua hal tersebut di atas adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013, disamping data sekunder yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi IPM selanjutnya.

Rantepao, September 2014

*Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Toraja Utara*

*Ruben, SE
Nip. 19631223 199202 1 001*

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Sumber Data	3
BAB II. METODE PENGHITUNGAN	4
2.1. Cara Penghitungan IPM	4
2.2. Ukuran Perkembangan IPM	6
BAB III. GAMBARAN UMUM	9
3.1. Letak Geografis	9
3.2. Kependudukan	9
3.3. Pendidikan	10
3.4. Ketenagakerjaan	11
3.5. Kesehatan	13
3.6. Konsumsi/Pengeluaran	14

BAB IV. ANALISIS IPM	16
4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara	17
4.2. Aspek Kesehatan	19
4.3. Aspek Pendidikan	21
4.4. Aspek Ekonomi	24
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1.. Kesimpulan	25
5.2. Saran	25

<http://torutkab.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Pada tahun 60-an banyak negara melaporkan bahwa di satu sisi berhasil mencapai pendapatan perkapita tinggi, namun di sisi lain penduduk miskin makin bertambah jumlahnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi akan sulit mencapai masyarakat yang makmur, aman dan terbebas dari tekanan hidup yang merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pada hakekatnya keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur dari berhasilnya membangun gedung-gedung pencakar langit serta jalan-jalan yang mulus akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat yang ke tempat yang tinggi. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya. Model-model alternatif pembangunan yang ditawarkan adalah pembangunan sumber daya manusia, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan manusia, akan tetapi ketiga model pembangunan ini dinilai masih bersifat parsial belum bersifat holistik.

Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya yaitu, tanah, modal dan mesin. Manusia diperalat untuk mengejar tingkat output yang tinggi namun dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada kebutuhan dasar manusia agar dapat keluar dari kemelut kemiskinan. Model ini telah mengiring manusia terpasung hingga tidak memiliki pilihan-pilihan lain. Sedangkan pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif atau dengan perkataan lain manusia tidak mengambil bagian untuk berperan dalam pembangunan.

Dengan demikian, pada tahun 1990 UNDP dalam laporannya “*Global Human Development Report*” memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (*Human Development*)”, sebagai paradigma baru model pembangunan. Konsep ini lebih komprehensif dan bersifat holistik yang mencakup ketiga model sebelumnya.

Berbagai pergeseran dalam kebijaksanaan pembangunan menyebabkan pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada harus disesuaikan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “*basic need development*”. Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf.

Kemudian dengan muncul dan berkembangnya paradigma baru pembangunan manusia, sejak tahun 1990 UNDP menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara sebagai penyedia data memandang perlu menghitung Indeks Pembangunan Manusia agar dapat digunakan berbagai perangkat untuk melakukan pengkajian guna mengukur kinerja pembangunan manusia selama ini dalam kurun waktu tertentu dimana “*strong point*”nya pada pembangunan manusia dengan menggunakan parameter IPM atau HDI.

1.2 Tujuan Penulisan.

Tujuan penulisan publikasi Mutu Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 adalah:

- a. Mengetahui komponen IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Standar hidup layak konsumsi perkapita Kabupaten Toraja Utara.
- b. Mengetahui Pencapaian Pembangunan Manusia.

1.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah data Susenas 2013 dan beberapa data sekunder lainnya dapat dijadikan referensi untuk menganalisis buku publikasi ini.

METODE PENGHITUNGAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas penduduk, hal ini dapat ditempuh dengan cara meningkatkan kapasitas dasar daya beli. Peningkatan kapasitas dasar adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas penduduk melalui pengembangan pengetahuan dan pendidikan serta perbaikan derajat kesehatan penduduk. Upaya ini merupakan bagian dari fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas social ekonomi dasar. Sedangkan peningkatan daya beli dapat ditempuh melalui perbaikan ekonomi, sehingga tercipta perluasan kesempatan kerja.

Dalam upaya peningkatan efektifitas pembangunan manusia, tidak terlepas dari penggunaan data statistik baik untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Perencanaan pembangunan dengan didukung oleh data statistik yang baik akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data Susenas Kor dapat dibentuk berbagai indikator kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan.

2.1 Cara Penghitungan IPM

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] \dots\dots\dots (1)$$

- Dimana : X(1) = Indeks harapan hidup
X(2) = Indeks pendidikan =(2/3 indeks melek huruf + 1/3 indeks rata-rata lama sekolah).
X(3) =Indeks Tingkat Kehidupan

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$Indeks X (i) = \frac{X(i) - X(i) \min}{X (i) maks - X(i) \min} \dots\dots\dots (2)$$

dimana,

- X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)
- X(i)maks : Nilai maksimum X(i)
- X(i)min : Nilai minimum X(i)

Tabel 2.1 Kondisi Ideal (sasaran) dan Kondisi Terburuk Komponen IPM

Faktor (1)	Indikator Komponen IPM [=X(i)] (2)	Kondisi	
		Ideal (3)	Terburuk (4)
Kelangsungan Hidup (Lamanya Hidup)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25
Pengetahuan (Tingkat Pendidikan)	Angka Melek Huruf	100	0
	Rata-rata lama sekolah	15	0
Daya Beli (Tingkat Kehidupan yang Layak)	Konsumsi riil per kapita (Rp)	732.720	360.000

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP

2.2 Ukuran Perkembangan IPM

Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Meningkatnya status pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan nilai IPM suatu daerah. Nilai IPM ini mencerminkan kualitas penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kenaikan/penurunan nilai IPM secara tidak langsung merupakan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk disuatu daerah.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah kedalam tiga golongan yang rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50 s/d 80), dan tinggi (80 keatas). Untuk keperluan daerah tingkat II (level kabupaten), tingkat status menengah dibagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tingkatan Status Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 50$
Menengah Bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah Atas	$66 \leq IPM < 80$
Tinggi	$IPM > 80$

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP

Klasifikasi status pembangunan manusia dapat digunakan untuk menunjukkan apakah upaya pembangunan yang telah dilakukan dapat meningkatkan “kelas” suatu wilayah. Jika “kelas” wilayahnya meningkat berarti terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk.

2. Membuat peringkat berdasarkan besaran IPM yang dapat menunjukkan secara relatif kinerja pembangunan suatu wilayah terhadap wilayah lain. Dengan diketahuinya peringkat IPM, maka tingkat kesejahteraan disuatu daerah dapat dibandingkan dengan daerah lain. Besaran IPM merupakan besaran kumulatif selama beberapa tahun dan periode terakhir, maka peringkat yang dihasilkan juga merupakan hasil kinerja kumulatif beberapa masa pemerintahan.

Tabel 2.3 Diagram Analisis Situasi Pencapaian Pembangunan Manusia

Determinan (Indikator)	Kelangsungan Hidup (Angka Kematian Bayi)	Pengetahuan (Lama Sekolah)	Daya Beli (Konsumsi Perkapita)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sebab Langsung	Persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis rendah	Persentase partisipasi sekolah 13-18 tahun rendah	Tingkat upah/pendapatan rendah
Sebab tidak langsung	Pemeriksaan status gizi ibu hamil	Fasilitas Pendidikan	Kesempatan kerja
Sebab mendasar	Kemiskinan, pendidikan	Kemiskinan, Pendidikan	Pertumbuhan ekonomi

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP

GAMBARAN UMUM

3.1 Letak Geografis

Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao memiliki luas wilayah sekitar 1.151,47 km². Daerah ini terdiri dari 21 kecamatan dengan 151 desa/kelurahan.

Jarak ibukota Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan ± 329 km dengan melewati Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Kabupaten Toraja Utara terletak dengan posisi antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju sebelah utara, Kabupaten Tana Toraja sebelah selatan serta pada sebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat.

3.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 berjumlah sebanyak 222.400 jiwa yang terdiri atas 112.000 laki-laki dan 110.400 perempuan dengan sex ratio 101 yang berarti jika terdapat sekitar 101 orang laki-laki diantara terdapat 100 orang perempuan.

Kepadatan penduduk perkilometer persegi sekitar 193 jiwa. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Rantepao yang merupakan ibukota Kabupaten Toraja Utara.

Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2013 sebanyak 83.868 jiwa, penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 124.141 jiwa dan penduduk yang berusia lanjut (65 tahun lebih) berjumlah 14.391 jiwa. Dilihat dari kelompok usia seperti itu, dapat diketahui rasio ketergantungan secara total yaitu 79,15 persen artinya setiap 100 orang yang produktif mempunyai tanggungan sebanyak 79 hingga 80 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

3.3 Pendidikan

Potensi sumber daya manusia di suatu daerah antara lain dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari semakin rendahnya persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah dan semakin tingginya persentase penduduk yang memiliki ijazah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2012, persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah sebesar 28,82 persen turun menjadi 28,00 persen pada tahun 2013. Demikian halnya persentase penduduk yang memiliki ijazah SLTP, SMA, Diploma I/II, Akademi/DIII, dan D IV/S1 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,29; 4,65; 0,25; 0,53; dan 0,27 persen dari tahun 2012. Hanya persentase penduduk yang memiliki ijazah SD/MI dan SMK pada tahun 2013 yang mengalami penurunan sekitar 5,11 persen untuk kepemilikan ijazah SD/MI yaitu dari 26,61 persen tahun 2012 turun menjadi 21,50 pada tahun 2013 dan untuk SMK menurun sekitar 1,04 persen yaitu dari angka 6,29 persen pada tahun 2012 turun menjadi sekitar 5,25 persen pada tahun 2013. Hal ini

menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan semakin tinggi.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Di Kabupaten Toraja Utara, 2012 - 2013

Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Tidak Punya Ijazah	28,82	28,00
SD/MI/Paket A	26,61	21,50
SLTP/MTs/Paket B	20,67	20,96
SMA/MA/Pket C	12,80	17,45
SMK	6,29	5,25
Diploma I/II	0,00	0,25
Akademi/ DIII	0,91	1,44
D IV/S1 +	4,88	5,15
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS Toraja Utara, 2013

3.4 Ketenagakerjaan

Konsep utama usia ketenagakerjaan yang dipakai adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara penduduk yang mencarari kerja dengan angkatan kerja.



TPAK di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,04 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 68,29 persen pada tahun 2012 menjadi 65,25 persen pada tahun 2013. Indikasi ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Toraja Utara, sebanyak 65 orang diantara masuk dalam angkatan kerja. Menurunnya TPAK merupakan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu, disisi lain TPT di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 juga mengalami penurunan sebesar 2,26 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari angka 5,08 persen pada tahun 2012, menjadi 2,82 persen pada tahun 2013. Walaupun mengalami penurunan, namun angka pengangguran ini tetap harus menjadi permasalahan yang serius, mengingat pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi, tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Selain itu, masih banyak pula pencari kerja terakomodir oleh lapangan kerja tersedia.

3.5 Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat jasmani dan rohani merupakan modal dasar pembangunan, karena bila SDM sehat maka akan menghasilkan masyarakat yang sehat pula, dimana masyarakat ini akan menjadi pelaku dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan derajat kesehatan penduduk. Pemerintah melalui berbagai program dibidang kesehatan berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu, bayi dan balita. Hal ini berhubungan erat dengan kehamilan ibu, proses kelahiran dan kelangsungan hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan penduduk disuatu daerah adalah persentase penolong kelahiran balita. Keberhasilan penolong kelahiran dan kemampuan seorang ibu untuk melahirkan anaknya sangat penting guna kelangsungan kehidupan anak tersebut selanjutnya. Oleh sebab itu, suatu keluarga perlu membuat keputusan yang paling tepat untuk memilih penolong kelahiran anaknya. Telah banyak fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memudahkan penduduk miskin agar mampu berobat ke rumah sakit ataupun puskesmas melalui program askeskin dan jamkesmas.

Dilihat dari masalah penolong persalinan untuk tenaga medis seperti dokter atau bidan dapat dianggap lebih baik dari pada dukun atau lainnya. Persalinan yang dicakup dalam Susenas ini adalah persalinan yang terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Jadi pada saat terjadinya wawancara anak responden, usia masih balita antara 0 – 4 tahun.

Dengan memperhatikan persentase tersebut di atas berarti pertolongan persalian untuk tenaga medis cukup dominan. Tenaga medis tersebut terutama adalah bidan dan dokter. Dari hasil Susenas 2013 diketahui bahwa penolong

persalinan untuk bidan dan dokter masing-masing jumlahnya mencapai sekitar 67,65 persen dan 10,53 persen.

Tabel 3.2
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran
Kabupaten Toraja Utara, 2012-2013

Penolong Persalinan	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Dokter	7,19	10,53
Bidan	69,94	67,65
Tenaga Medis Lainnya	0,00	0,19
Dukun	18,27	21,11
Keluarga	4,60	0,51
Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Toraja Utara, 2013

3.6 Konsumsi/Pengeluaran

Pendapatan rumah tangga merupakan bagian dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diterima oleh rumah tangga. Pendapatan perkapita atas dasar pendekatan pengeluaran dari hasil Susenas digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan rumah tangga. Dengan diketahuinya perubahan pengeluaran perkapita sebulan untuk setiap tahunnya, maka dapat diketahui pula apakah ada kenaikan/penurunan pendapatan penduduk. Pendapatan yang diterima rumah tangga setiap bulannya berpengaruh pada kemampuan daya beli terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga tersebut.

Sumber : Badan Pusat Statistik Toraja Utara, 2013

Tabel 3.3
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran
Makanan dan Non Makanan, 2012-2013

Kelompok Pengeluaran (Rp 000)	Makanan		Non Makanan	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< Rp 99.	8,49	6,55	54,19	54,70
Rp 100 –149.+	18,53	21,81	17,36	16,15
Rp 150 – 199 +	24,34	20,39	9,86	9,17
Rp 200 -299 +	27,15	25,96	8,35	7,79
Rp 300. +	17,15	25,29	5,74	12,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2013 pengeluaran perkapita penduduk pada kelompok makanan < Rp 99 ribu berkurang menjadi 6,55 persen dari tahun sebelumnya 8,49 persen artinya ada sekitar 1,94 persen yang pengeluarannya tidak lagi berada pada kelompok tersebut. Pada kelompok pengeluaran Rp 300 ribu keatas terjadi peningkatan dari 17,15 persen menjadi 25,29 persen.

ANALISIS I P M

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*), dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara adil, buah pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada kehidupan rakyat sehari-hari, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Proses ini biasanya tidak secara otomatis tampak, akan tetapi memerlukan waktu serta manajemen kebijakan yang hati-hati. Pembangunan oleh rakyat berarti rakyat harus benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal manusia dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan ataupun indikator-indikator lain. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia, akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal ini kinerja ekonominya.

Dengan kata lain, bahwa peningkatan kualitas modal manusia akan sekaligus memberikan mamfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah.

4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia disuatu daerah/wilayah. Jarak yang harus ditempuh (shortfall) suatu wilayah mempunyai nilai maksimum 100. Artinya jika suatu wilayah telah mencapai angka 100 maka pembangunan manusia secara keseluruhan telah tercapai. Jadi suatu wilayah yang mempunyai angka IPM yang masih rendah atau masih jauh dari pembangunan manusia dapat dikatakan masih jauh. Dan tentunya hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua daerah/wilayah/negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penggerak utama harus mengupayakan pemberdayaan manusia sehingga dapat memperpendek jarak tujuan.

Tabel 4.1
IPM Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Terdekat
Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat Propinsi		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Toraja Utara	70,14	71,04	71,69	20	19	19
02. Tana Toraja	72,29	72,90	73,76	10	10	10
03. Luwu Timur	73,11	73,56	73,96	8	8	9
04. Luwu	74,42	74,68	74,68	6	6	6
05. Enrekang	74,84	75,30	75,67	4	4	4
06. Pinrang	73,80	74,39	74,87	7	7	7
Sulawesi Selatan	72,14	72,70	73,28			

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara

Selama periode tiga tahun terakhir, IPM Toraja Utara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai IPM Kabupaten Toraja Utara telah mencapai 71,69 sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 dengan angka IPM baru sekitar 71,04. Sementara ranking IPM Toraja Utara se Sulawesi Selatan masih tetap posisi 19.

Tabel 4.2
Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Toraja Utara, 2011 – 2013

No.	Komponen	2011	2012	2013
1	2	3	4	
1	Kesehatan			
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,58	73,62	73,66
	b. Indeks Kesehatan (%)	80,97	81,03	81,10
2	Pendidikan			
	a. Angka Melek Huruf (%)	85,28	85,85	87,38
	b. Rata-rata Lama Sekolah (%)	7,41	7,86	7,88
	c. Indeks Pendidikan (%)	73,31	74,70	75,76
3	Hidup Layak			
	a. Paritas Daya Beli (Rp 000)	602,89	608,39	611,88
	b. Indeks Daya Beli (%)	56,13	57,40	58,21
	IPM	70,14	71,04	71,69

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51-79 digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi. Dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, maka IPM Kabupaten Toraja Utara tergolong **IPM menengah**. Untuk Sulawesi Selatan belum satupun kabupaten berada pada posisi golongan IPM Tinggi.

Peningkatan angka IPM ini tentunya sangat ditentukan oleh komponen IPM itu sendiri, ada tiga komponen pembentukan IPM yaitu komponen *harapan hidup*, komponen *pendidikan* dan komponen *daya beli*. Terjadinya kenaikan pada setiap komponen berpengaruh pula pada kenaikan angka IPM.

4.2 Aspek Kesehatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, Kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Agar dapat dicapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh makanan, air minum, pakaian, pemukiman, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Disamping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk.

Pada hakekatnya derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan

peran serta masyarakat dan swasta.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

Komponen IPM berupa Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. Pada periode tahun 2011-2013 Angka Harapan Hidup terus mengalami peningkatan, misalnya pada tahun 2011 AHH sebesar 73,58 tahun meningkat menjadi 73,62 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 73,66 tahun. Dibandingkan Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan tahun 2013 hanya sekitar 70,60 tahun yang berarti lebih rendah dari AHH Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Toraja Utara secara rata-rata masih lebih baik dibandingkan tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan secara rata-rata.

Peningkatan AHH ini tidak terlepas dari berbagai aspek pendukung kehidupan masyarakat, seperti sarana kesehatan yang tersedia, peningkatan pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat, fasilitas lingkungan yang tersedia untuk kebutuhan sehari-hari serta kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat disamping telah tersedianya Rumah Sakit Umum sebanyak 2 buah berada di ibu kota Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2013 terdapat 22 buah Puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan. Dengan demikian pada tahun 2012 rasio penduduk per puskesmas adalah sekitar 10.109 orang, artinya bahwa setiap puskesmas dapat melayani 10.109 orang

Pada tahun 2013 tenaga dokter sebanyak 30 orang, perawat 171 orang, bidan 110 orang, farmasi 20 orang, ahli gizi 24 orang, sanitasi 21 orang dan tenaga kesehatan masyarakat 17 orang. tenaga medis dokter (dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi) pada tahun 2012 berjumlah 40 orang, Dengan demikian pada tahun 2012 dari 5.508 orang penduduk terdapat seorang dokter.

4.3 Aspek Pendidikan

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Sulawesi Selatan sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Selatan yang menyebutkan strategi yang dilakukan di antaranya; perluasan dan pemerataan di dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, program wajib belajar 9 tahun, beasiswa dan lain-lain

Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi dan sosial. Sehingga keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat.



Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi mutu sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Indikator untuk melihat perkembangan tingkat pendidikan disuatu daerah diantaranya adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dilihat dari Angka Melek Huruf Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 sebesar 87,38 persen, dengan demikian Angka Buta Huruf di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 masih sekitar 12,62 persen dari total usia 5 tahun ke atas, angka tersebut masih cukup tinggi. Indikasi ini menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Toraja Utara perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, rendahnya AMH penduduk diindikasikan oleh tingginya angka Buta Huruf.

Indikator angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk memonitor tingkat pencapaian pendidikan penduduk dalam bersekolah. Interpretasinya, semakin tinggi angka tersebut maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai/ditamatkan penduduk. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 sebesar 7,88 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Toraja Utara hanya bersekolah sampai kelas dua pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP). Tentunya ini harus menjadi perhatian serius dari berbagai pihak terkait karena angka ini masih sangat rendah.

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap maju atau mundurnya dunia pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah keterbatasan dari sisi jumlah guru pada daerah-daerah terpencil. Isu yang masih sering muncul bahwa banyaknya guru yang enggan ditempatkan pada daerah terpencil, sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah-daerah perkotaan.

Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru dengan murid dan sekolah. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan, namun semakin kecil rasio guru dan murid/sekolah maka akan menggambarkan beban dan ketersediaan guru.

Pada tahun 2013 rasio murid SD terhadap guru SD adalah 23. artinya ada sekitar 23 murid SD yang harus diajar oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar, sementara rasio siswa terhadap guru SLTP/ sederajat sekitar 20, SLTA/ sederajat sekitar 12 dan SMK sekitar 9. Angka rasio tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin kecil angka tersebut artinya pengawasan/beban kerja seorang guru terhadap murid/siswa sekolah akan lebih baik

4.3. Aspek Ekonomi

Dalam bidang ekonomi telah memperlihatkan adanya kecenderungan yang semakin membaik, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto perkaita, paritas daya beli dan dampak terhadap adanya perbaikan ekonomi. Dampak tersebut dapat dicerminkan oleh beberapa informasi pendukung seperti ketersediaan air bersih, listrik dan konsumsi rumah tangga. Dalam bahasan berikut tidak lagi dikemukakan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita, karena hal tersebut telah dikemukakan pada bagian tulisan lain.

Pengukuran pembangunan manusia dikaitkan dengan beberapa aspek, diantaranya adalah aspek daya beli masyarakat. Indeks daya beli masyarakat dicerminkan oleh pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Pengeluaran riil perkapita selama periode 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 pengeluaran riil per kapita sebesar Rp 602.890 meningkat menjadi Rp Rp 608.390 pada tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp 611.880. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat adalah tingkat pendapatan penduduk. Jika pengeluaran perkapita penduduk naik, berarti dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan penduduk juga naik.

Pengeluaran riil perkapita dari tahun ke tahun terus meningkat sangat dimungkin oleh karena laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 tumbuh sebesar 8,51 persen, lebih cepat dari tahun sebelumnya 8,47 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. IPM merupakan salah satu tolok ukur yang mencerminkan aspek-aspek pembangunan manusia, dianggap cukup baik untuk menggambarkan aspek sosial maupun ekonomi dalam capaian pembangunan.
2. IPM Kabupaten toraja utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tahun 2013 sudah mencapai angka 71,69, peringkat se Provinsi Sulawesi Selatan pada urutan 19.
3. Komponen IPM Tahun 2013 masing-masing untuk Indeks Kesehatan sebesar 81,10, Indek Pendidikan sebesar 75,76 dan Indeks Daya Beli sebesar 58,21 persen.

5.2. Saran

Karena seluruh komponen IPM masih cukup rendah, maka disarankan kepada semua pihak terkait agar lebih fokus pada bagaimana meningkatkan pembangunan Mutu Sumber Daya Manusia dan sebaiknya dilakukan secara terpadu.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://torutkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TORAJA UTARA

Jl. Jenderal A. Yani No 64 Rantepao, Toraja Utara

Kotak Pos : 91831, Fax/Telp. (0423) 21262

Website: <http://torutkab.bps.go.id>

E-mail : bps7326@bps.go.id